

**PENGEMBANGAN BUDAYA KEWIRAUSAHAAN
MELALUI KULIAH KERJA NYATA USAHA
DALAM PENDIDIKAN TINGGI**

PELIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TERIMA TGL. : 14 November 2000
NO. DAFTAR/HARGA : Hadiah
KATEGORI : K.2
NO. IDENTITAS : 4453/19000 - P.2
REKAMASI : 371.38 Jam - 10



*(Disampaikan pada Semlok Metodologi Pengembangan Budaya
Kewirausahaan di IKIP Padang Tanggal 6 - 10 November 1998)*

Oleh :

DR. JAMARIS JAMNA, M.Pd.
Dosen PLS - FIP IKIP Padang

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1998**

PENGEMBANGAN BUDAYA KEWIRAUSAHAAN MELALUI
KKN-USAHA DALAM PENDIDIKAN TINGGI *

Oleh : Jamaris Jamna **

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sampai saat ini membawa pengaruh besar terhadap strategi pembangunan di segala bidang. Masa orde baru kebijakan ekonomi lebih di arahkan pada upaya terciptanya konglomerasi yang ternyata tidak kokoh menghadapi era globalisasi. Pada masa ini muncul istilah yang kaya semakin kaya, dan miskin semakin miskin. Yang menikmati hasil kebijakan ekonomi tersebut hanya segelintir orang, sementara yang lain hanya berada pada pihak konsumen. Menurut Prof. H.W. Arndt (Gatra:1998) seorang pakar ekonomi dari *Australia National University*, bahwa terdapat tiga keterianjuran yang dibuat oleh pemerintah orde baru yang mengarah pada ketidak merataan, antara lain kurang memberikan prioritas utama pada kesejahteraan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Pada era reformasi ini, pemerintah mulai memperhatikan dinamika ekonomi dari masyarakat kecil dengan mengambil kebijakan ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan, menurut Fevrisond Daswir (Gatra:1998) bahwa sistem perekonomian yang semua anggota masyarakat tidak hanya turut serta dalam proses produksi dan distribusi, melainkan juga ikut serta memiliki. Peran negara, seperti dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, terutama ditekankan pada sisi pengendalian yang tertuju pada pembuatan aturan perundang-undangan. Baik yang bertolak dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak maupun yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat selalu lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang per-orang, dan agar penguasaan produksi tidak jatuh ke tangan per-orangan.

Kebijakan ekonomi kerakyatan yang mulai ditempuh pemerintah, ternyata mendapat sambutan positif dari kalangan pengelola

* Disampaikan pada Semlok Metodologi Pengembangan Budaya Kewirausahaan di IKIP Padang tanggal 6 - 10 November 1998.

* Staf Pengajar FIP dan Ketua Pengelola KKN IKIP Padang

pendidikan tinggi, dalam hal ini Direktorat Binlitabmas Dikti Depdikbud. Direktorat ini telah lama mengkaji dan mengupayakan bagaimana menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Kenyataan yang berkembang bagi lulusan perguruan tinggi bahwa sekitar 34 juta pengusaha kecil yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 3 - 5 % yang berpendidikan tinggi dengan kurang dari 2 % diantaranya adalah lulusan program Diploma/Politeknik. Juga disinyalir, tahun 1995 sekitar 12,4 % dari lulusan perguruan tinggi Indonesia masih menganggur (Jajah Koswara:1998). Artinya, bahwa sebagian besar dari lulusan perguruan tinggi masih mengharapkan atau mencari pekerjaan, ketimbang mewujudkan usaha sendiri alias berwirausaha. Pada hal sudah banyak program studi di perguruan tinggi Indonesia yang mengajarkan mata kuliah kewirausahaan/kewiraswastaan. Bahkan terdapat perguruan tinggi yang memiliki program studi kewirausahaan. Namun hal ini belum menjamin bagi mereka untuk mampu berwirausaha atau berupaya menciptakan usaha sendiri. Berarti hanya mampu menguasai pengetahuan tentang kewirausahaan, dan tidak memiliki sikap dan perilaku berwirausaha.

Salah satu program yang selama ini masih dalam pembinaan Direktorat Binlitabmas Dikti adalah kuliah kerja nyata (KKN). Pelaksanaan KKN selama ini lebih ditujukan untuk memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa, dan memantapkan masyarakat melancarkan pembangunan di lokasinya masing-masing. Akhir-akhir ini kegiatan KKN sudah mulai jenuh, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat penerima. Hal ini terlihat semakin berkurangnya jumlah peserta KKN dari tahun ke tahun. Partisipasi masyarakat dalam membantu peserta KKN di lapangan semakin sedikit.

Jadi, di satu sisi terdapat kejenuhan dalam orientasi KKN yang berlangsung selama ini, dan di sisi lain ada upaya pemerintahan dan kebutuhan masyarakat terhadap usaha pemandirian lulusan perguruan tinggi melalui program pembudayaan kewirausahaan. Sejalan dengan itu, sangatlah tepat saat ini program KKN dikembangkan menjadi KKN-Urusa dalam mewujudkan kemandirian lulusan perguruan tinggi dan peningkatan kualitas wirausaha masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk usulan program pemandirian mahasiswa untuk menjadi calon wirausaha baru dan peningkatan kualitas wirausaha masyarakat ?

B. Kuliah Kerja Nyata Usaha (KKNU)

Kuliah kerja nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Program KKN merupakan intrakurikuler dengan memberikan pendidikan kepada mahasiswa yang memerlukan keterlibatan masyarakat dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang bersangkutan (Dikti:1993). Kekhasan mata kuliah ini dengan yang lainnya terletak pada interdisipliner dan komprehensif, artinya peserta yang terlibat dalam menangani suatu masalah masyarakat memiliki latar belakang berbagai bidang disiplin ilmu dan komprehensif. Pola pikir yang dikembangkan oleh KKN, diandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan dalam masyarakat selalu mempunyai kaitan satu dengan yang lain, sehingga menjadi rumit. Mereka harus mampu menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat, walaupun terdapat perbedaan ilmu pengetahuannya. Di sini lebih diutamakan usaha kerjasama yang saling toleransi, saling memberi dan memunculkan *team work*.

Pelaksanaan kuliah kerja nyata menggunakan cara *teamwork*, ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Untuk melakukan pekerjaan pada masa datang agar profesional dan kompak, maka nilai-nilai *teamwork* ini sangat dibutuhkan. Salah satu kelemahan yang menonjol bagi pekerja-pekerja masyarakat Indonesia adalah dari segi *teamwork* ini. Apabila mendidik mahasiswa menjadi calon wirausaha baru yang profesional dan berkerja secara *teamwork*, maka keikutsertaan mereka melalui kuliah kerja nyata sangat tepat sekali.

Program kuliah kerja nyata usaha (KKN-Usaha) yang sedang berlangsung, adalah kerjasama antara Dirjen Dikti dengan Meneg Kependudukan/BKKBN. Program ini lebih ditekankan pada upaya mahasiswa memberdayakan keluarga prasejahtera yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Maksud kegiatan ini memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa menerapkan IPTEKS pada keadaan nyata di lapangan sebagai laboratorium sosial, sekaligus memacu percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga (Juknis KKN:1998). Tujuan program Kuliah Kerja Usaha dalam kerjasama dengan BKKBN adalah berikut ini.

1. Membantu keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera I dalam pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga melalui penerapan IPTEKS yang sesuai.
2. Memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk menerapkan IPTEKS-nya pada keadaan nyata di lapangan sebagai laboratorium sosial, yang sekaligus dapat meningkatkan citra perguruan tinggi yang bersangkutan di masyarakat.
3. Melatih mahasiswa agar mampu mengelola program kewirausahaan yang berkesinambungan berdasarkan pemikiran yang komprehensif, analitis dan proyektif.
4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan **sektor-sektor terkait dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga.**

Manfaat program Kuliah Kerja Nyata Usaha dapat dirasakan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Bagi masyarakat dan keluarga, terutama keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I memberikan kemampuan untuk secara mandiri meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
2. Bagi perguruan tinggi, tersedia kesempatan untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang kian kompleks.
3. Bagi Dosen pembimbing lapangan, selain untuk memperoleh angka kredit, keberhasilan membina kelompok usaha juga dapat menjadi promosi yang baik bagi dosen yang bersangkutan, serta merupakan sumber inspirasi bagi bahan karya ilmiah.
4. Bagi mahasiswa, kegiatan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif diharapkan dapat menjadi semacam laboratorium mahasiswa untuk mengkaji, menerapkan ilmu yang diterimanya di bangku kuliah, melatih berwirausaha melalui kesertaannya dalam usaha kelompok, belajar mengadakan investasi dan membangun kemitraan.
5. Bagi pemerintah daerah, kegiatan yang dilakukan mahasiswa dapat mejadi salah satu cara untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan program pengembangan ekonomi keluarga dan membantu pemerintah daerah untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan (Kantor Meneg Kependudukan/BKKBN dan Depdikbud:1997).

Kegiatan KKN-Usaha yang bersifat interdisipliner dan sinambung memiliki karakteristik berikut ini.

1. Mahasiswa dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, akselarator dan sumber informasi (MODIN-AKSI) dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 2. Materi dan keterampilan yang diperlukan dapat diperoleh dari kuliah reguler, maupun dalam pembekalan yang dilakukan pengelola.
 3. Kegiatannya memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus dalam membantu masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPPKS guna menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan keluarga secara interdisiplin.
 4. Satu UPPKS yang mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif dapat dibina oleh lebih dari satu mahasiswa, demikian juga satu mahasiswa dapat membina lebih dari satu UPPKS.
 5. Kegiatan mahasiswa yang melaksanakannya tergantung pada potensi dan masalah masyarakat serta kemampuan yang dimiliki mahasiswa dan perguruan tingginya.
 6. Kegiatannya bersifat sinambung, antar satu periode dengan periode berikutnya dapat ditindaklanjuti, baik oleh peserta kegiatan pasca KKN-Usaha maupun periode KKN-Usaha berikutnya.
 7. Kegiatan Pasca KKN-Usaha merupakan salah satu bentuk kegiatan sivitas akademika yang sekaligus menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa peserta sebelumnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar sivitas akademika semakin mampu memahami dan menghayati permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat dari program pembangunan.
 8. Kegiatan setiap periode berlangsung di lapangan antara 2 - 3 bulan, terutama bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program Strata I.
 9. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yang dikordinir oleh Pengelola KKN (Alimuddin Arief:1997)
- KKN prima Sejahtera!
 IKIP Padang sejak tahun 1997 telah mulai merintis kegiatan kuliah kerja nyata usaha yang menekankan pada pembinaan kelompok UPPKS (KKN-reguler). Pada tahun 1998, tim pengelola KKN IKIP Padang mensosialisasikan dua bentuk program KKN, yaitu KKN Prima Sejahtera dan KKN Prima Mandiri. KKN Prima Sejahtera adalah

kegiatan KKN reguler yang bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa melalui pembinaan kelompok UPPKS, dan prinsip yang digunakan adalah belajar dan membelajarkan. KKN Prima Mandiri adalah kegiatan pasca KKN yang bertujuan untuk memandirikan mahasiswa melalui kerjasama dengan kelompok usaha kecil dan koperasi yang menggunakan prinsip belajar dan berusaha (Jamaris:1997). Kedua program ini menurut rencana akan dilaksanakan secara maksimal mulai tahun 2000, karena saat ini sedang disiapkan sarana dan prasarannya, antara lain buku pedoman, format evaluasi, dan penjajakan kelompok mitra (Tim pengelola KKN IKIP Padang:1997).

Mengamati bentuk program-program KKN di atas, maka program pengembangan budaya kewirausahaan melalui KKN-Usaha di pendidikan tinggi oleh Dikti (Penlok Metodologi Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi:1998), merupakan pengembangan dan penajaman program. Menurut penulis, program KKN-Usaha Dirjen Dikti ini tidak jauh berbeda dengan program KKN Prima Mandiri yang sedang dipersiapkan untuk dilaksanakan oleh tim Pengelola KKN IKIP Padang. Untuk itu diharapkan pada tahun-tahun mendatang program KKN Prima Mandiri dari IKIP Padang hendaknya mudah dilaksanakan dan dapat dukungan moril dan materil dari sivitas akademika.

Program KKN-Usaha yang dikembangkan Dirjen Dikti ini, memiliki tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan kewirausahaan di masyarakat maupun di kalangan mahasiswa. Secara praktisnya adalah mengembangkan para calon wirausahawan menjadi wirausaha yang handal dan mandiri melalui proses transformasi yang berprinsip pemihakan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Gatot Murdjito:1998). Manfaat KKN-Usaha ini adalah : (1) membantu pemerintah memacu pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi; (2) Membantu percepatan terwujudnya calon sarjana yang berjiwa wirausahawan dan sadar masalah pedesaan; (3) Membantu peningkatan dan pengembangan usaha kecil yang potensial disuatu daerah agar memiliki kemampuan daya saing yang tinggi, kinerja yang meningkat dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang mantap (Direktorat Biniitabmas:1998).

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan makalah Gatot Murdjito (1998) dan pedoman usulan Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan tinggi, bahwa pendekatan dalam pengembangan kewirausahaan ini dikemukakannya beberapa tahap berikut ini.

1. Metode pengumpulan data awal/data dasar tentang usaha kecil, serta identifikasi karakteristik usaha kecil yang dibutuhkan wirausaha yang akan dibina-kembangkan di tempat KKNU.
2. Metode pendekatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka : (a) membangkitkan potensi wirausaha yang terpendam; (b) menyamakan persepsi, sikap dan perilaku usaha kecil serta cara meningkatkan usahanya; (c) Memicu pertumbuhan usaha kecil dalam masyarakat binaan dengan mentransfer kemampuan dan keterampilan berusaha.
3. Bimbingan konsultasi, para pembimbing/konsultan langsung melakukan pemantauan dan konsultasi bagi mahasiswa KKNU dan pengusaha kecil di lapangan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan program.
4. Khalayak sasarannya adalah : (a) pengusaha kecil yang ada di desa binaan, (b) masyarakat umum yang berminat menjadi wirausahawan, (c) mahasiswa sukarela yang ingin menjadi wirausahawan. Khalayak sasaran dapat berupa perorangan maupun kelompok/sentra usaha.

D. Model Usulan Kegiatan

Agar kegiatan KKNU ini dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, maka Direktorat Binlitabmas Dikti membantu biayanya sebanyak Rp.30.000.000,- bagi proposal yang lolos seleksi. Dana ini sebagai perangsang bagi perguruan tinggi yang bersangkutan agar melaksanakan secara sungguh-sungguh dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan dana untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kesinambungannya diharapkan dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan pihak-pihak lainnya yang memiliki komitmen terhadap program ini.

Supaya usulan KKNU ini diproses lebih lanjut oleh Direktorat Binlitabmas, dapat diikuti langkah-langkah berikut ini.

4453/K/2000-P.

1. Analisis situasi

Menjelaskan secara akurat dan realistis kondisi yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu tentang khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan KGNU baik sumber daya alam (bahan mentah, bahan baku usaha yang tersedia dan kemungkinan perolehan sumber-sumber lain) maupun sumber daya manusianya (tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah yang terlibat, dan lainnya). Secara umum syarat analisis situasi ini adalah: (a) tersedia data dan informasi, (b) tersedia penganalisis, (c) teknik analisis, dan (d) model sinoptik.

2. Target iuaran kegiatan

Merumuskan secara spesifik target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program itu. Secara logis dan sistematis, target tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai pertimbangan baik yang mendukung maupun kendala yang akan dihadapi.

3. Perumusan masalah mitra industri kecil atau koperasi

Setiap masalah dicirikan oleh adanya penyimpangan harapan dari semestinya. Kalau dirasakan faktor penyebab dari masalah tidak diketahui maka perumusan masalah haruslah dimulai dengan pernyataan singkat tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Perumusan masalah ditekankan pada kebutuhan mendapatkan gambaran masalah ke dalam karakteristik khusus atau faktor mengapanya. Dalam perumusan masalah spesifik memuatkan informasi yang sudah mengandung pertanyaan apa (identitas), dimana (lokasi), kapan (waktu), berapa (luas, jauh, banyak). Cara lain perumusan masalah adalah memusatkan pada dua segi, yaitu pertama pada objek masaihnya, kedua pada penyimpangannya.

4. Metodologi penyelesaian masalah

Gambaran berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih alternatif yang paling baik yang akan dilakukan dalam kegiatan KGNU yang diusulkan. Perlu dijelaskan bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah di atas, serta bagaimana sifat kegiatannya.

5. Denah lokasi daerah binaan -- Jelas

6. Manfaat :

- a. Potensi ekonomi produk, mengemukakan keuntungan dan prospek masa datang serta terjaminnya ketersediaan bahan yang berkesinambungan baik pada daerah setempat maupun kemudahan dalam memperolehnya.
- b. Nilai tambah produk dari segi IPTEK, mengemukakan adanya nilai tambah yang dapat meningkatkan upaya efisiensi dan efektivitas dari berbagai aspek usaha, baik dari segi perangkat keras (alat-alat produksi) maupun perangkat lunak (manajemen).
- c. Dampak sosial bagi lingkungan sekitar industri kecil mitra atau koperasi, mengemukakan manfaat yang dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat dari yang bersifat ketergantungan kepada kemandirian, baik berupa materiil maupun non materiil.

7. Informasi tentang industri kecil mitra atau koperasi

- a. Sumber daya manusia dan peralatan, mengemukakan kualitas dan kuantitas manusia yang dilibatkan dalam KKNUG pada kelompok mitra. Begitu juga dari peralatan yang tersedia, apakah memenuhi standar yang dibutuhkan, mencukupi atau tidak, dan syarat-syarat lainnya (seperti kesehatan dan keselamatan).
- b. Kondisi manajemen, mengemukakan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen kelompok mitra, al. produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusianya.
- c. Kondisi produksi, mengemukakan kuantitas dan kualitas produksi seperti jenis produksi, simplifikasi dan standarisasi, spesialisasi dan diversifikasi, layout produk dan proses, perencanaan dan pengawasan produk, desain produk.
- d. Kondisi pemasaran, mengemukakan upaya-upaya yang dilakukan dalam memasarkan produk, seperti penjajakan pasar, saluran-saluran distribusi, penentuan harga, pengawasan penjualan, penyusunan advertensi dan promosi penjualan.

8. Fisibilitas sumber daya perguruan tinggi

Pelaksana kegiatan (nama staf pengajar dan nama mahasiswa)

- a. Sumber daya manusia, mengemukakan relevansi staf dan mahasiswa yang dilibatkan dengan jenis usaha yang menjadi

sasaran, ketersediaan waktu dengan kapasitas kerja yang akan dilakukan.

- b. Sumber daya peraiatan, mengemukakan dukungan peraiatan yang tersedia atau dapat disediakan oleh perguruan tinggi yang sesuai dengan jenis usaha kelompok sasaran, keterjangkauan biaya dalam mendapatkan peraiatan yang dibutuhkan, dan kesederhanaan peraiatan yang mampu dicerna dan digunakan oleh kelompok sasaran dan lebih berdaya guna.
- c. Rencana dan jaduai kerja berikut program yang rinci, mengemukakan kelogisan, kejelasan, kesinambungan, kesatuan, ketuntasan dan ketersanggupan dari peserta KGNU.

4. Rencana Anggaran Biaya

Mengemukakan rincian biaya dari segi honorarium pengelola, peraiatan yang dibutuhkan, bahan habis pakai, biaya lain-lain. Dalam menyusun anggaran ini, sangat dituntut ketelitian dan kelogisan serta bahan-bahan yang betul-tetel dibutuhkan. Sehingga anggaran tersebut logis dan layak untuk dipenuhi, dan akan lebih baik kalau keseluruhan anggaran itu lebih banyak terserap pada pengadaan bahan dan alat serta proses pembelajarannya.

10. Indikator Kinerja

Untuk program KGNU indikator kinerja yang dituntut adalah terwujudnya 40 % peserta siap jadi wirausaha baru (membuat rencana usaha) dengan topik yang telah dikembangkan ke perguruan tinggi.

Daftar Bacaan

- Alimufi Arief, (1997), Pengembangan KKN dalam Pelaksanaan KKN di IKIP Surabaya, LPM, Surabaya.
- Direktorat Binlitabmas, (1998), Pedoman Usulan Program Pengembangan Budaya Kewirusahaan dalam Pendidikan Tinggi, Dikti, Jakarta.
- , (1996), Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dikti, Jakarta.
- , (1993), Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perguruan Tinggi, Dikti, Jakarta.
- Gatra, (1998), Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Majalah Edisi November 1998, Jakarta.
- Hendrawati, (1997), Pemahaman Terhadap Analisa Situasi dan Penyusunan Program, LPM UNAND, Padang.
- Jajah Koswara, (1998), Kebijaksanaan Pengembangan Budaya Kewirusahaan di Pendidikan Tinggi, Direktorat Binlitabmas Dikti, Jakarta.
- Jamaris, (1997), Perkembangan KKN dalam Pelaksanaan KKN-U di IKIP Padang, LPM, Padang
- Meneg.Kependudukan dan BKKBN, (1997), Petunjuk Teknis Paranserta Mahasiswa dan Dosen dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera Guna Penghapusan Kemiskinan, Jakarta.
- Tim Pengelola KKN IKIP Padang, (1998), KKN Prima Sejahtera dan KKN Prima Mandiri IKIP Padang, Padang.

1320

Lampiran II: Surat Keputusan Rektor IKIP Padang

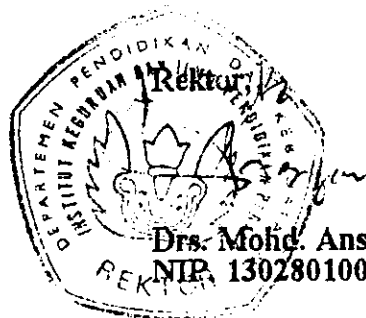
Nomor : 180/K12/PM/1998

Tanggal : 26 Oktober 1998

Tentang :

Penunjukan Dosen Penyaji Makalah Pada Seminar dan Lokakarya
Metodologi Pengembangan Budaya Kewirausahaan
di IKIP Padang

No.	NAMA	JUDUL MAKALAH
1.	Dr. H. Nurtain	1. Kebijakan Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. 2. Falsafah dan Prinsip-prinsip Pengembangan Budaya Kewirausahaan.
2.	Drs. Zulkahar Adenan	1. Pemantauan dan Evaluasi Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan. 2. Penyusunan Laporan dan Publikasi Ilmiah Kegiatan Pengembangan Budaya Kewirausahaan.
3.	Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS.	Program Kuliah Kewirausahaan (KKU)
4.	Dr. Jamaris Jamna, M.Pd.	Program Kuliah Kerja Nyata Usaha (KKN-U).
5.	Drs. Eswendi, M.Pd.	Program Magang Kewirausahaan (MKU).
6.	Drs. Hasdi Almon, M.Si.	Program Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK).
7.	Drs. Akmal, M.Si.	Program karya Alternatif Mahasiswa (KAM).
8.	Drs. Syamsul Amar B, MS.	Program Inkubasi Wirausaha Baru (INWUB).



Drs. Mohd. Ansyar, Ph.D.
NIP. 130280100

IKIP PADANG